

## Bab V

# KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

### Kesimpulan

KEPULAUAN NUSANTARA MERUPAKAN WILAYAH YANG SANGAT KAYA dengan warisan spiritual, sebuah tradisi yang secara terbuka mengakui dan menerima perbedaan. Hal ini dilandasi kesadaran bahwa perbedaan yang ada hanyalah bersifat lahiriah, dan semua bertemu dalam suatu realitas substansial yang sama. Dalam suasana seperti inilah Islam dibawa oleh para wali, tokoh-tokoh yang sangat mementingkan aspek substantif ajaran agama tanpa mengabaikan aspek-aspek lahiriah, masuk ke Nusantara. Karena itu, penduduk Nusantara menerima Islam layaknya menerima pesan-pesan luhur spiritual yang mengakui eksistensi dan realitas tradisi keberagaman yang telah menjadi bagian integral kehidupan mereka.

Seperti sering diingatkan bahwa agama adalah jalan dan cara (*syir'ah wa minhaj*), dua prinsip yang terkandung di dalamnya adalah: ketulusan mengabdikan kepada Allah swt. (*ikhlah al-'ibadah ilâ Allâh*) dan berhias dengan akhlak mulia dan terpuji (*al-tahalli bi makârim al-akhlâq*). Pengabdian kepada Allah swt. tidak hanya dilakukan dalam ibadah murni (*ibadah mahdlah*) seperti shalat, zakat,

puasa, dan haji, melainkan juga dalam membantu dan melayani makhluk Allah swt. Ini berarti selalu ada dimensi ibadah dalam setiap aktivitas umat beragama, tergantung pada niat atau maksud dalam melakukan aktivitas yang bersangkutan. Sedangkan akhlak mulia secara eksplisit menekankan agar pengabdian kepada Allah swt. dalam berbagai bentuk dan caranya dilakukan dengan cara-cara yang baik dan terpuji, tidak merugikan atau menyakiti siapa pun.

Walaupun tidak dirumuskan secara teoretis, keberagamaan penduduk Nusantara sama belaka dengan yang disebutkan di atas. Perhatian, pelayanan, dan bantuan terhadap siapa pun dilakukan dengan kesadaran menciptakan karma bagus bagi umat Hindu, untuk memberi darma dan melepaskan manusia dari penderitaan dunia maya ini bagi umat Budha, untuk mendapat *ridlâ* Allah swt. bagi umat Islam, dan sebagai wujud kasih sayang Allah terhadap sesama bagi umat Nasrani. Dan dengan tepat Pancasila merefleksikan pesan-pesan luhur agama ini: Hyang Mahaesa, nilai-nilai kemanusiaan, perasaan sebagai satu-kesatuan, musyawarah dalam kepemimpinan, dan keadilan.

Pesan-pesan luhur inilah yang belakangan digugat dan dihujat oleh kelompok-kelompok garis keras sebagai penyebab degradasi moral dan keterpurukan bangsa Indonesia, baik dalam bidang politik maupun ekonomi. Tujuannya jelas, dengan mendiskreditkan Pancasila mereka berusaha melakukan formalisasi agama, yakni pemahaman mereka yang sempit, dangkal, parsial, dan kaku tentang Islam. Padahal realitasnya jelas, degradasi moral dan keterpurukan bangsa adalah karena ulah penguasa yang tidak setia pada dasar dan konstitusi negara. Hingga saat ini, pesan-pesan syari'ah sebagaimana terefleksi dalam Pancasila belum sepenuhnya diwujudkan. Karena itu, degradasi moral dan keterpurukan bangsa hanya dalih semata untuk mengganti Pancasila dengan negara Islam versi mereka dan/atau mengubah NKRI dengan khilafah internasional.

Sebenarnya, benih gerakan garis keras sudah hadir di Indonesia modern sejak dekade 1970-an walaupun ketika itu hadir ber-manis muka dan belum menunjukkan tujuan yang sebenarnya, karena mereka sadar belum punya kekuatan yang memadai. Benih ini kemudian tumbuh bagai jamur di musim hujan menjelang dan setelah berakhirnya rejim Orde Baru dengan memanfaatkan atmosfer demokrasi dan kebebasan untuk tujuan yang tidak demokratis dan membungkam kebebasan. Ada beberapa di antaranya yang memilih aksi-aksi jalanan sebagai media memaksakan ideologinya, namun ada pula yang memilih jalur politik praktis dan parlementer. Fenomena ini menarik perhatian dan keprihatinan banyak pihak, terutama umat Islam moderat dan nasionalis yang mencium gelagat tak beres dalam aksi-aksi mereka.

Melalui studi yang didesain untuk menemukan, menunjukkan, dan membuktikan ada dan tidaknya bahaya laten dalam gerakan-gerakan tersebut, diketahui bahwa gerakan-gerakan ini punya hubungan dengan gerakan Islam transnasional yang berasal dari Timur Tengah, terutama Wahabi, Ikhwanul Muslimin, dan Hizbut Tahrir. Tujuan mereka adalah mengatur semua aspek kehidupan bangsa Indonesia. Dengan kata lain, mereka menganut ideologi totalitarian-sentralistik yang menjadikan agama sebagai justifikasi teologis bagi ambisi politiknya. Sedangkan agenda utama mereka adalah untuk menjadi wakil Allah swt. Dengan segala keterbatasan dan kedangkalan pemahaman dan pengamalannya atas ajaran Islam, mereka merasa berhak mewakili-Nya.

Keyakinan umat Islam bahwa Allah swt. mengatur semua aspek hidup manusia digunakan dengan sangat licik oleh mereka. Memang benar Allah swt. mengatur semua aspek hidup manusia, tapi pemahaman politis kelompok garis keras adalah kesalahpahaman yang berpangkal pada sempit dan dangkalnya pemahaman mereka tentang Islam. Para ulama moderat memahami keyakinan ini dalam sikap berislam (berserah diri) yang mendalam dan ikhlas (tulus) melalui amal-amal *nawâfil* sehingga Allah swt. hadir bag-

inya sebagai pendengaran, penglihatan, lisan, dan kedua kakinya, sehingga indera dan organ tubuhnya hanya melakukan apa yang memang dikehendaki oleh Allah swt.<sup>1</sup> Allah swt. tidak mengatur semua aspek kehidupan manusia secara politik dan kekuasaan, melainkan secara spiritual dan cinta. Berislam secara ikhlas dan mendalam bermakna hanya berserah diri kepada Allah swt., bukan pada kehendak-kehendak rendah hewani, termasuk yang dikemas dalam retorika politik orang-orang yang mengklaim berhak mewakili Allah swt. dan memanfaatkan agama sebagai alat untuk menguasai semua aspek hidup setiap orang.

Demi ambisi politiknya, mereka menyusup ke banyak bidang kehidupan bangsa Indonesia: dari istana negara hingga ke pegunungan; melalui jalur parlementer, aksi-aksi jalanan, penyerobotan mesjid dan lembaga-lembaga pendidikan, hingga *cleaning service* gratis; bahkan ke dalam ormas-ormas Islam moderat. Semua ini dilakukan sebagai aksi-aksi yang saling mendukung secara sistemik. Ada kalanya aksi-aksi jalanan, misalnya, mendapat pembelaan dan dukungan di parlemen, dan mendapat pembenaran melalui fatwa MUI. Pernah juga terjadi fatwa MUI didukung aksi-aksi jalanan dan parlementer. Demikian pula isu-isu politik di parlemen mendapat dukungan aksi-aksi jalanan dan MUI. Semua ini tidak bisa dilihat sebagai sebuah kebetulan semata.

Ada dua alasan aksi-aksi saling dukung ini bisa terjadi. *Pertama*, ada kesamaan ideologis di antara kelompok-kelompok garis keras yang terlibat, yang terutama berafiliasi dengan Wahabi, Ikh-

---

1. Teks lengkap hadits qudsi ini berbunyi: “*Lâ yazâl al‘abd yataqarrabu ilayya bi al-nawâfil hatta uhibbahu. Fa-idza ahbabtuhu, kuntu sam‘ahu alladzi yasma‘u bihi, kuntu ‘ainâhu allati yubshiru biha, kuntu lisanahu alladzi yanthiqu bihi, kuntu rijlâhu allati yabthisyu biha*” (“Hamba-Ku terus mendekatkan diri kepada-Ku dengan melaksanakan amal-amal yang menyenangkan (*nawâfil*) hingga Aku mencintainya. Dan manakala Aku mencintainya, Aku menjadi pendengaran yang dengannya dia mendengar, menjadi kedua matanya yang dengannya dia melihat, menjadi lisannya yang dengannya dia berucap, dan menjadi kedua kakinya yang dengannya dia berjalan”).

wanul Muslimin, dan/atau Hizbut Tahrir. Namun bukan berarti bahwa tidak ada perbedaan. Untuk saat ini, mereka masih bisa bersatu karena merasa menghadapi musuh bersama, yakni umat Islam moderat yang menolak formalisasi agama dan lebih menekankan spiritualitas dan keberagamaan substantif. Kelak, jika kelompok moderat telah berhasil dikuasai, mereka akan bertikai di antara mereka sendiri untuk merebut kekuasaan mutlak di tanah air kita.

Alasan *kedua*, Wahabisasi global telah menjadi bisnis yang menggiurkan sehingga banyak aktivis telah memperoleh keuntungan finansial dari aksi-aksi yang mereka lakukan. Berpadunya ideologi, dana, dan sistem dalam gerakan garis keras ini membuat aksi-aksi mereka sangat berbahaya bagi tradisi keberagamaan bangsa Indonesia sebagaimana juga bagi kelestarian Pancasila dan keutuhan NKRI.

Aspek lain yang harus mendapat perhatian serius adalah, jika pada masa Orde Lama dan Orde Baru gerakan garis keras berada di luar pemerintahan, dewasa ini telah menyusup jauh ke dalamnya. Hal ini membuat mereka semakin berani dan berbahaya, karena usaha-usaha mengganti Pancasila dan mengubah NKRI bisa dilakukan melalui jalur parlementer di tingkat nasional maupun regional. Bahkan, aksi-aksi ilegal dan inkonstitusional yang mereka lakukan mendapat dukungan dan perlindungan dari pemerintah. Keberhasilan para aktivis garis keras menyusup ke dalam pemerintahan ini, di samping karena kekuatan ideologi, dana, dan sistem yang mereka miliki, juga dimungkinkan oleh politisi oportunistis yang lebih mengutamakan keuntungan pribadi dan kelompoknya dan tanpa perasaan mengorbankan masa depan bangsa dan negaranya.

Fenomena ini tampak menguat dalam lima tahun terakhir ini, termasuk adanya beberapa departemen yang jelas-jelas berpihak pada kepentingan kelompok-kelompok garis keras. Apakah penguasa yang membiarkan hal ini terjadi adalah oportunistis atau bukan, hanya Allah swt. yang tahu. Seandainya semata karena ti-

dak menyadari sepenuhnya bahaya-bahaya yang mengancam bangsa dan negara kita, semoga Allah swt. mengilhami mereka agar mengutamakan kepentingan bangsa dan negara kita, dan berani menolak kelompok-kelompok garis keras yang memanfaatkan mereka dalam mencapai tujuan politiknya. Namun jika kedekatan mereka dengan kelompok-kelompok garis keras karena oportuniste, rakyat harus sadar dalam memilih pemimpin yang mengutamakan kepentingan bangsa dan negara kita.

Politisi oportunistis sama berbahayanya dengan para aktivis gerakan garis keras sendiri. Mereka adalah orang-orang munafik yang bermuka ganda dan tampil sesuai dengan kepentingan dan keuntungan yang ingin diraihinya. Demikian pula perilaku partai oportunistis. Jika kelompok garis keras ingin berkuasa dan mengatur setiap aspek kehidupan manusia atas nama Allah swt., maka para oportunistis ingin meraih dan melestarikan kekuasaan serta menumpuk kekayaan untuk diri dan kelompoknya. Kepentingan bangsa dan negara, sebagaimana juga keluhuran pesan agama, tidak punya tempat dalam agenda perjuangan mereka. Tidak ada secercah pun harapan masa depan yang lebih cerah dari kelompok-kelompok garis keras maupun partai dan politisi oportunistis selain kekangan, larangan, dan serangkaian aturan yang akan membelenggu kebebasan dan kreativitas setiap orang, yang mereka lakukan untuk menjamin tercapainya ambisi politiknya.

Keterlibatan gerakan garis keras transnasional dan dana asing (Wahabi), di samping partai dan politisi oportunistis, telah membuat fenomena gerakan garis keras di Indonesia menjadi cukup besar dan kompleks. Retorika mereka menjadi pengantar pada banyak aksi-asksi kekerasan atas nama agama. Penolakan ormas-ormas Islam moderat seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah telah membuat gerakan garis keras menjadikan kedua ormas ini sebagai salah satu target utama infiltrasi mereka. Di samping karena kesetiiaannya pada tradisi keberagamaan bangsa Indonesia yang santun dan toleran, NU dan Muhammadiyah telah menerima Pan-

casila dan NKRI sebagai konsensus final bangsa Indonesia.

Para tokoh Islam moderat menilai gerakan garis keras sebagai akibat dangkalnya pemahaman dan pengamalan ajaran Islam. Persis karena alasan inilah mereka menolak dan menyerang spiritualitas —karena tidak mengerti— sebagai penyimpangan dari ajaran Islam. Maka usaha-usaha untuk melestarikan Pancasila dan keutuhan NKRI, sekaligus untuk menghadirkan Islam sebagai *rahmatan lil‘âlamîn*, harus dilakukan dengan cara-cara damai, bertanggung jawab, dan melalui jalur pendidikan —dalam arti kata seluas-luasnya— yang mencerahkan. Usaha-usaha ini bukan hanya kewajiban NU dan Muhammadiyah, melainkan semua komponen bangsa sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya. Dalam konteks era reformasi dan demokrasi ini sangat penting mengingat nasehat Syekh Ibn ‘Athailah al-Sakandari dalam *Hikam* karyanya: “Janganlah bersahabat dengan siapa pun yang perilakunya tidak membangkitkan gairahmu mendekat kepada Allah dan kata-katanya tidak menunjukkanmu kepada-Nya” (*lâ tash-hab man lâ yunhid-luka ilâ Allah hâluhu, wa la yahdika ilâ Allâh maqâluhu*). Perilaku dan perkataan para aktivis garis keras maupun politisi oportunistis jelas membuat umat Islam semakin jauh dari Allah swt. Hal ini harus disadari dan diwaspadai oleh seluruh rakyat Indonesia.

SKPP Muhammadiyah No. 149/Kep/I.0/B/2006<sup>2</sup> dan keputusan Bahtsul Masa’il NU tentang Khilafah Islamiyah,<sup>3</sup> adalah usaha-usaha penyadaran secara struktural. Saat ini, beberapa pengurus Muhammadiyah dan NU telah mengambil sikap tegas terhadap infiltrasi garis keras ke dalam organisasi mereka. Kedua ormas Islam moderat ini telah berusaha menyadarkan para elit dan masyarakat bahwa kelompok-kelompok garis keras itu berbahaya karena membawa ideologi transnasional (*asing*) yang mengancam budaya dan tradisi keberagaman bangsa Indonesia, mengancam Pancasila

---

2. Lihat Lampiran 1 buku ini.

3. Lihat Lampiran 2 buku ini.

dan keutuhan NKRI. Menurut SKPP Muhammadiyah dan fatwa-fatwa NU, apa yang dilakukan organisasi-organisasi garis keras itu bukan gerakan dakwah, melainkan gerakan politik untuk tujuan meraih kekuasaan.

### **Rekomendasi Strategis**

Ideologi dan agenda garis keras yang telah memanipulasi keyakinan umat Islam menyebabkan mereka sering bersikap dan bertindak brutal terhadap siapa pun yang tidak mendukung, apalagi yang menolak, pandangan mereka. Karena itu, usaha dalam mengatasi masalah ini membutuhkan orang-orang yang bersifat kesatria dan berani, yang tidak takut kepada siapa pun kecuali kepada Allah swt.

Dalam sejarah Nusantara, kita mengenal adanya para wali, resi, kesatria dan pemberani yang selalu tampil membela kebenaran dan memperjuangkan keadilan. Keteladanan semacam ini terus mengilhami generasi demi generasi, dan para Pendiri Bangsa adalah di antaranya. Dewasa ini pun, tetap ada banyak orang Indonesia yang mewarisi sifat-sifat mulia tersebut. Mereka berjuang demi kebenaran dan keadilan dengan tetap setia pada falsafah hidup nenek moyang dan persatuan bangsa kita. Sayangnya, karena tidak terorganisasi, mereka sering merasa terpisah dan terisolir. Sementara pada saat yang sama para agen garis keras terus menyerang siapa pun yang mengajarkan dan melestarikan nilai-nilai luhur agama dan falsafah hidup nenek moyang kita. Dalam hal inilah kita perlu membangun gerakan yang mampu mengilhami dan mendukung mayoritas terbesar bangsa Indonesia yang selama ini diam (*the silent majority*) demi menyuarakan kebenaran agama dan tradisi nenek moyang kita. Dengan demikian, kelompok-kelompok garis keras tidak akan berhasil menguasai Indonesia, dan umat Islam moderat akan kembali mewarnai kehidupan berbangsa dan bernegara yang bisa menjadi jaminan bagi minoritas dan benar-benar menjadi rahmat bagi seluruh makhluk.

Untuk melestarikan Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan menegakkan warisan luhur tradisi, budaya dan spiritualitas bangsa Indonesia, harus ada usaha-usaha terorganisasi untuk melaksanakan langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Mengajak dan mengilhami masyarakat dan para elit untuk bersikap terbuka, rendah hati, dan terus belajar agar bisa memahami spiritualitas dan esensi ajaran agama, dan menjadi jiwa-jiwa yang tenang.
2. Menghentikan dan memutus –dengan cara-cara damai dan bertanggung jawab– mata rantai penyebaran paham dan ideologi garis keras melalui pendidikan (dalam arti kata yang seluas-luasnya) yang mencerahkan, serta mengajarkan dan mengamalkan pesan-pesan luhur agama Islam yang mampu menumbuhkan kesadaran sebagai hamba Tuhan yang rendah hati, toleran dan damai.
3. Menyadarkan para elit dan masyarakat bahwa paham dan ideologi garis keras yang dibawa oleh gerakan Islam transnasional dari Timur Tengah dan disebarkan oleh kaki tangannya di Indonesia bertentangan dengan Islam serta tradisi, budaya dan corak keberagaman bangsa Indonesia yang sejak lama bersifat santun, toleran, dan moderat.
4. Memperjuangkan, melestarikan dan mewujudkan Pancasila yang merefleksikan esensi syari’ah, serta meyakinkan para elit dan masyarakat bahwa hal ini merupakan cara untuk mewujudkan Islam benar-benar sebagai rahmat Tuhan bagi seluruh makhluk, sebagaimana dicita-citakan oleh para Pendiri Bangsa.
5. Bekerjasama dengan para kyai spiritual untuk merevitalisasi Nahdlatul Ulama sesuai dengan paham *Ahlussunnah wal Jamá’ah*, serta mohon dan mendukung kyai-kyai spiritual untuk memimpin NU. Dengan cara demikian, kelompok

kelompok dan para agen garis keras akan sulit menyusup dan mempengaruhi ormas moderat ini; NU akan membantu menghentikan penyusupan garis keras ke pemerintahan, MUI, dan bidang-bidang strategis lainnya; membangun negara menjadi lebih adil dan sejahtera; dan menjadi pelopor perjuangan membebaskan dunia dari krisis kesalahpahaman tentang Islam serta menyelamatkannya dari ancaman dan bahaya garis keras.

6. Bekerjasama dengan para ulama, intelektual, dan budayawan dari beragam disiplin dan keahlian, dari ormas-ormas Islam moderat, untuk memberikan informasi alternatif atas fatwa-fatwa MUI yang tidak sepenuhnya menyuarakan pesan sejati Islam; dan dalam kerangka ini pula, mendorong proses *istinbath* hukum di lingkungan MUI dilakukan secara terbuka dan melibatkan para ulama di luar struktur keanggotaan MUI dari berbagai disiplin dan keahlian untuk berpartisipasi di dalamnya, agar *istinbath* hukum tidak dilakukan secara tertutup dan terbatas kepada orang-orang yang sealiran seperti lazim di lingkungan Wahabi atau sekte-sekte yang fanatik.
7. Berkerjasama dan mendorong para praktisi pendidikan dari tingkat dasar, menengah, dan tinggi untuk memperkenalkan dan mengajarkan kekayaan, keluhuran, dan arti penting warisan budaya dan tradisi bangsa Indonesia; mendorong otoritas dunia pendidikan dan para praktisi pendidikan, orangtua/wali murid, untuk kersikap kritis terhadap berbagai kegiatan dan pengajaran keagamaan di lingkungan mereka yang kerap digunakan sebagai sarana infiltrasi ideologi garis keras; mengkampanyekan *life-long study* atau belajar seumur hidup agar bisa mengatasi kebodohan, khususnya dalam pemahaman dan pengamalan ajaran agama.
8. Bekerjasama dengan para pengusaha untuk mendukung terwujudnya keadilan, keamanan, ketertiban, dan stabilitas

sosial demi terwujudnya kehidupan berbangsa dan bernegara yang adil dan sejahtera melalui institusi-institusi pemerintahan dan masyarakat sipil; mengajak para pengusaha untuk menggunakan kekayaan mereka secara bijaksana, agar tidak pernah mendukung kelompok-kelompok garis keras maupun parpol dan/atau politisi oportunistik yang bekerjasama dengan garis keras untuk mencapai agenda politiknya; kelompok-kelompok garis keras sangat khawatir jika para pengusaha memutuskan untuk melawan dan menghentikan mereka.<sup>4</sup>

9. Mewujudkan institusi pemerintahan yang bersih, adil, dan taat hukum (*the institutions of good governance and the rule of law*), yang mengutamakan usaha-usaha untuk mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan agar masyarakat dan negara bisa berkembang dan menjadi lebih maju secara nyata, dan agar jargon keadilan dan kesejahteraan tidak lagi menjadi komoditas politik kelompok-kelompok garis keras dalam usaha mencapai tujuan dan agenda politik mereka.
10. Menumbuhkan dan meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang pesan-pesan luhur agama Islam sebagai rahmat bagi seluruh makhluk, dan memobilisasi tokoh-tokoh Indonesia yang *nguri-uri ngelmu* (menghidupkan dan mengamalkan warisan spiritual bangsa) untuk membantu umat manusia mengatasi krisis salah paham tentang Islam yang telah menyebar dari garis keras Timur Tengah ke Barat dan Timur serta melahirkan ancaman serius bagi non-Muslim dan Muslim di seluruh dunia.
11. Membangun jaringan generasi cinta Merah-Putih yang akan mengilhami generasi muda mengenai arti penting sejarah, tradisi dan budaya nenek moyang bangsa sendiri, mendo-

---

4. Sadanand Dhume mengutip pernyataan Anis Matta (Sekjen PKS ketika itu) dalam: *My Friend the Fanatic: Travel with an Indonesian Islamist* (Melbourne: Text Publishing Company, 2008), h. 239.

rong pemahaman tradisi dan budaya bangsa dalam konteks keagamaan secara utuh, menyeluruh dan mendalam. Dengan demikian gerakan dan ideologi asing seperti Wahabi, Ikhwanul Muslimin, Hizbut Tahrir dan lain-lain tidak akan menemukan celah untuk menyusup dan mencuci otak anak-anak bangsa.

12. Menumbuhkan keyakinan dan kebanggaan bahwa tradisi dan budaya bangsa sendiri sejalan dengan ajaran agama yang dianut bangsa Indonesia, walaupun Nusantara bukan tempat turunnya agama-agama dimaksud; mendorong usaha-usaha pemahaman keagamaan, tradisi, dan budaya secara integral, mendalam dan menyeluruh agar anak-anak bangsa tidak mengadopsi tradisi dan budaya asing secara tidak cerdas dan dangkal yang sangat bernafsu melakukan pemusnahan kultural (*cultural genocide*) terhadap budaya Nusantara.

Apakah anak-anak cucu kita kelak akan mewarisi Indonesia yang tetap santun, toleran, damai, beradab, dan spiritual, kitalah yang menentukan pilihan.